

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM  
MENYAMPAIKAN KELUHAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH  
SAKIT MELALUI MEDIA MASSA**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh  
Bambang Kamiwarno  
NIM 10.93.0057

Kepada  
FAKULTAS PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG

2015



**TESIS**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM  
MENYAMPAIKAN KELUHAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH  
SAKIT MELALUI MEDIA MASSA**

Diajukan oleh  
Bambang Kamiwarno  
NIM 10.93.0057

telah disetujui oleh :

Pembimbing utama

dr.Hadi Sulistyanto,SpPD.MH.Kes FINASIM tanggal 14 Februari 2015

Pembimbing pendamping

A. Joko Purwoko, SH. MH

tanggal 22 Juni 2015



**TESIS**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN DALAM**  
**MENYAMPAIKAN KELUHAN PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH**  
**SAKIT MELALUI MEDIA MASSA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh  
Bambang Kamiwarno  
NIM : 10.93.0057  
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal \_\_\_\_\_ 2015

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain

dr.Hadi Sulistyanto, SpPD, MH. Kes FINASIM.

Dr Y Sarwo Budi, SH, MH

Pembimbing Pendamping

A.Joko Purwoko, SH. MH

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum  
Tanggal \_\_\_\_\_

Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Perlindungan hukum terhadap pasien dalam menyampaikan keluhan pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui media massa”**, sebagai syarat akhir pendidikan di Fakultas Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membuka peluang kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk memperdalam ilmu di bidang hukum kesehatan.
4. Dr Endang Wahyati Yustina,SH MH selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang yang telah mengizinkan penulis untuk memperdalam ilmu di bidang hukum kesehatan.

5. dr. Hadi Sulistyanto, SpPD MH.Kes FINASIM, dr. Sofyan Dahlan, SpF dan Bapak A.Joko Purwoko, SH. M.H, selaku dosen pembimbing dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan tesis ini
6. Bapak Dr Y.Budi Sarwo, SH., M.H selaku dosen penguji.
7. Segenap dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan
8. Teman-teman Program Studi Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan angkatan XIV tahun 2010, para sahabatku dari awal merasakan bangku kuliah, terimakasih atas ketulusan kalian, kebersamaan dalam suka dan duka, semoga kebersamaan dalam kekeluargaan ini senantiasa tetap terjaga sampai kelak.
9. Teruntuk isteriku tercinta, terimakasih atas kasih sayang, perhatian dan kesabaran dalam memberi semangat dan inspirasi untuk menyelesaikan tesis ini
10. Sosok “Yuda” dan “Nia” yang selalu ada untukku, terimakasih atas adamu



11. Semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian proses tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan didunia dan akhirat

Meskipun tesis ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari tesis ini. Maka dengan kerendahan hati penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum kesehatan pada khususnya.

Semarang, 28 Januari 2015

Penulis

Bambang Kamiwarno

## DAFTAR ISI

Hal	
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Metode Penelitian .....	14
1. Metode Pendekatan .....	15
2. Spesifikasi Penelitian .....	15
3. Jenis data .....	16
4. Metode Pengumpulan Data .....	19
5. Metode Analisa Data .....	20
F. Penyajian Tesis .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	22
A. Kerangka teori .....	22
1. Perlindungan hukum .....	22

a.	Pengertian perlindungan hukum .....	22
b.	Bentuk-bentuk perlindungan hukum .....	23
c.	Asas dan tujuan perlindungan hukum .....	24
2.	Pasien .....	25
a.	Pengertian pasien .....	25
b.	Hak dan kewajiban pasien dalam peraturan perundangan ....	37
1)	Hak dan kewajiban pasien dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	39
2)	Hak dan kewajiban pasien dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .....	46
3)	Hak dan kewajiban pasien dalam UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit .....	50
4)	Hak dan kewajiban pasien dalam UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran .....	52
5)	Hak dan kewajiban pasien dalam KUHPerdata .....	55
6)	Hak dan kewajiban pasien dalam KUHPidana .....	60
7)	Hak dan kewajiban pasien dalam UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronika .....	67
3.	Sinkronisasi peraturan perundang-undangan.....	74
a.	Pengertian sinkronisasi .....	74
b.	Jenis sinkronisasi peraturan perundangan .....	76
4.	Rumah Sakit .....	78
a.	Pengertian Rumah Sakit .....	78
b.	Hak dan Kewajiban Rumah Sakit .....	91
c.	Tanggungjawab Rumah Sakit .....	98

6. Media Massa .....	104
a. Pengertian Media Massa .....	104
b. Fungsi Media Massa .....	106
c. Peranan Media Massa .....	110
7. Perjanjian .....	113
a. Pengertian perjanjian .....	113
b. Macam-macam perjanjian .....	116
c. Hubungan pasien dan rumah sakit .....	123
B. Kerangka Pemikiran .....	125
<b>Bab III Hasil penelitian dan pembahasan</b> .....	126
A. Hasil Penelitian .....	126
B. Pembahasan .....	141
<b>Bab IV Penutup</b> .....	161
A. Kesimpulan .....	161
B. Saran .....	163
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	166

## ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui undang-undang yang mengatur hak pasien dan taraf sinkronisasi horizontal peraturan perundangan tentang perlindungan hukum terhadap pasien dalam menyampaikan keluhan pelayanan kesehatan melalui media massa.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *doktrinal* bersifat diskriptif yaitu mengkaji keberadaan suatu kebenaran hukum terkait perlindungan hukum terhadap pasien dalam menyampaikan keluhan pelayanan kesehatan di rumah sakit melalui media massa. Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen dan kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak pasien untuk memperoleh perlindungan hukum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara khusus perlindungan hukum terhadap pasien dalam menyampaikan keluhan pelayanan kesehatan di rumah sakit media massa telah diatur dalam UU No 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Tetapi dalam kenyataan dilapangan, hak pasien yang diatur dalam UU Rumah Sakit terjadi benturan, tumpang tindih, dan tidak sinkron dengan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama menyangkut Pasal tentang tindakan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.

Pada taraf sinkronisasi horizontal antara UU Rumah Sakit dan UU ITE, dengan asas perundangan *lex specialis derogat legi generalis*, maka UU Rumah Sakit bersifat khusus karena lebih mengatur hubungan hukum pasien dan tenaga kesehatan dan UU ITE bersifat umum karena lebih banyak mengatur transaksi elektronika dalam lingkup publik ataupun privat yang selalu dikaitkan dengan unsur pidana. Sehingga UU ITE tidak dapat begitu saja diterapkan dalam hubungan hukum pasien dan tenaga kesehatan di rumah sakit. Dalam penelitian ini, UU ITE dinilai sangat lentur, multi interpretasi dan dianggap membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, sehingga perlu adanya amandemen terhadap UU ITE yang rancu, tidak logis dalam penerapannya dilapangan supaya memberikan kejelasan perlindungan atas hak pasien.

Kata kunci : perlindungan hukum pasien, rumah sakit, media massa

## ABSTRACT

Legal protection is every effort to ensure legal certainty, so it can give legal protection to the relevant parties or who did legal action. The objective of this study is understanding laws that arrange the patients' rights and the level of legislation horizontal synchronization about legal protection to the patients in conveying their complaints about health services through mass media.

This study is a normative legal research or descriptive doctrinal, which reviewing the existence of a legal validity related to the patients' legal protection in conveying their complaints about health services through mass media. The sources of this study include primary and secondary legal materials. The research data were collected by using document and literature study.

The research findings showed that the patients' rights to get legal protection was arranged in the legislation. Legal protection to the patient in conveying their complaints about health services in hospital through mass media was arranged specifically in Legislation Number 44 Year 2009 about Hospital. But in fact, there are some overlaps, clash and unsynchronized with Legislation Number 11 Year 2008 about Electronic Information and Transaction especially related to the Article about humiliation and defamation.

In the level of horizontal synchronization between Hospital Legislation and ITE Legislation, with the principle of legislation *lex specialis derogat legi generalis*, in that case Hospital Legislation is more specific because it arranged the relation of patients' law and health personnels and ITE Legislation is more general because it more arranged about electronic transaction in the public or private scope which is always linked to the criminal elements. So ITE Legislation cannot be applied in the relation of patients' law and health personnels in the hospital. In this study, UU ITE is assessed very flexible, multi interpretation and considered limit the freedom right to express and convey arguments, then the amendment to ambiguous, illogical and inapplicable UU ITE is needed in the order to provide conspicuousness protection to the patients' rights.

Keywords : legal protection to the patient, hospital, mass media

